



## Evaluasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus di Desa Rejosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragir Hulu

Lita Mistika Putri<sup>1)</sup>, Nina Yuslaini<sup>2)</sup>

Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

[litamistikaputri@student.uir.ac.id](mailto:litamistikaputri@student.uir.ac.id)<sup>1)</sup>  
[ninayuslaini@soc.uir.ac.id](mailto:ninayuslaini@soc.uir.ac.id)<sup>2)</sup>

### Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Rejosari dievaluasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang objektif tentang peristiwa yang terjadi di lingkungan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah cukup optimal dalam menjalankan proram-program yang ada, hanya saja ada program yang belum berjalan yaitu program rumah tahfizh dikarenakan kurangnya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat sehingga belum ada murid yang mendaftar, serta dana anggaran yang terbatas atau cukup dalam menjalankan program. Kesimpulan bahwa terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sosialisasi secara langsung dengan masyarakat. Kontribusi tulisan ini adalah untuk memberikan masukan kepada Pemerintahan Desa Rejosari dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa di Provinsi Riau.

**Kata kunci:** Bantuan Keuangan Khusus, Evaluasi, Pengelolaan, Pemerintahan Desa

### Abstract

*This study sought to establish the best method for assessing the Special Financial Assistance (BKK) management in Rejosari Village, Lirik District, Indragiri Hulu Regency. The research method in this research uses qualitative with a descriptive approach, where the researcher wants to describe the phenomena found in the research scenario objectively. The results of this study indicate that it is quite optimal in running the existing programs, it's just that there are programs that have not been running, namely the tahfizh house program due to the lack of direct socialization to the community so that no students have registered, as well as limited or sufficient budget funds in running the program. The conclusion is that there are several obstacles such as the lack of direct socialization with the community. The contribution of this paper is to provide input to the Rejosari Village Government in managing Village Special Financial Assistance (BKK) in Riau Province.*

**Key words:** Special Financial Assistance, Evaluation, Management, Village Government

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak wilayah yang terdiri dari provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Selain itu, pemerintahannya dijalankan secara desentralisasi (Sunarso & SH, 2023). Di Indonesia, prinsip desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahannya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan mengenai Pemerintahan Daerah yang menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberi tanggungjawab dan kewenangan dalam mengatur segala urusan daerah diluar dari kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peran terhadap masyarakat. (Badaruddin et al., 2021; del Arco et al., 2021). Selain itu, dengan adanya otonomi di lingkungan strategis globalisasi maka tiap daerah akan mampu mengembangkan potensi dan keanekaragaman di wilayahnya sehingga mempunyai daya saing namun tetap memegang prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan dalam sistem Negara Indonesia.

Kewenangan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peran terhadap masyarakat. (Silubun et al., 2020). Mengurus, mengelola, dan melayani rakyat adalah tanggung jawab pemerintah. (Osborne, 2020). Salah satunya adalah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang merupakan program Pemerintah yang dibuat dan dijalankan di Desa.

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) diberikan dan dikelola oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (A Baso, 2023; Tyas et al., 2023). Untuk tujuan tertentu, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan khusus kepada desa. Tujuan ini didasarkan pada prioritas pembangunan desa. (Adamowicz & Zwolińska-Ligaj, 2020; X. Zhang & Zhang, 2020). Usulan dari Pemerintahan Desa atau Perangkat Daerah digunakan untuk memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa. (Rondinelli, 2022). Bantuan Keuangan Khusus (BKK) diatur oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencacatan Sipil Provinsi Riau tentang Petunjuk teknis penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa. Keputusan ini dibuat sebagai perubahan dari Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa.

Menurut Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 tahun 2020, Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa, bantuan keuangan adalah dana yang diberikan kepada organisasi atau lembaga tertentu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan berasal dari Anggaran dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kabupaten Indragiri Hulu memiliki 178 Desa, 14 Kecamatan, dan 16 Kelurahan. Kecamatan Lirik yang memiliki 17 Desa yang sudah menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK), Desa Rejosari adalah salah satu dari 17 Desa di Kecamatan Lirik.

**Tabel 1.** Tahun dan jumlah Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang diterima di Desa Rejosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu 2022–2023

NO	Tahun Penerimaan BKK	Jumlah Penerima BKK
1.	Tahun 2022.	Rp, 125.000.000.
2.	Tahun 2023.	Rp, 167.000.000.

Sumber: Pemerintahan Desa Rejosari, 2024

Tabel di atas menunjukkan tentang jumlah penerimaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pada tahun 2022-2023 yang di berikan oleh Pemerintahan Daerah kepada Desa Rejosari, pada tahun 2022 jumlah penerima BKK Rp, 125.000.000 dan pada tahun 2023 jumlah penerima BKK Rp, 167.000.000.

Adanya bantuan keuangan ini dilandasi dari pengalokasian dana dari kabupaten terhadap pembangunan desa yang kurang memadai (Liu et al., 2020; Vogel, 2021). Oleh sebab itu, bantuan keuangan ini diberikan pemerintah provinsi agar mampu meningkatkan perekonomian desa yang masih kurang, sehingga pemerataan pembangunan akan dapat terwujud dan menciptakan desa mandiri (Li et al., 2022; Y. Zhang et al., 2020).

Dengan hadirnya Bantuan Keuangan Khusus dari pemerintah provinsi, maka jelas akan mewujudkan pemerataan serta percepatan pembangunan desa, tidak hanya itu ekonomi desa

diharapkan akan mengalami peningkatan, dan penguatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan akan terjadi melalui suntikan dana tersebut (Iskandar, 2020). Target utama dari bantuan dana tersebut adalah untuk pemberdayaan masyarakat serta belanja aparatur desa.

Program-program Bantuan Keuangan Khusus (BKK), sebagai berikut :

- a. Pelatihan kewirausahaan pemuda dan pemudi.
- b. Pembangunan rehab poskamling.
- c. Rehab atau pembangunan prasarana percepatan perkembangan ekonomi desa.
- d. Dukungan penanganan stunting dan penanggulangan ekstrim serta penanggulangan kemiskinan desa.
- e. Perlengkapan praktek dokter desa.
- f. Pelatihan penasihat program Bumdes.
- g. Pojok baca (Pengadaan fasilitas perpustakaan/ taman baca/ pojok baca).
- h. Perjalanan dinas pemerintahan desa (Kepala desa, sekertaris desa, keuangan dan BPD).
- i. Bantuan operasional dan pelaporan.
- j. Penyertaan modal Bumdes.
- k. Penyertaan modal Bumdes bersma.
- l. Pengadaan perlengkapan keselamatan didesa.
- m. Bantuan operasional posyandu.
- n. Pengadaan fasilitas ruang publik terbuka.
- o. Insentif guru tahfizh dan pelaporan.
- p. Pelatihan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
- q. Pembuatan peta potensi rawan bencana dan pembuatan jalur evluasi bencana didesa.

Ketepatan sasaran adalah indikator penting untuk program yang disalurkan, seperti program BKK. Indikator ini berfungsi sebagai tolak ukur pertama untuk mengetahui apakah program tersebut menyelesaikan masalah yang ada di lapangan atau tidak. Jika tidak, program tersebut akan terus beroperasi (Dendorfer et al., 2021; Lindig et al., 2021; Naser & Alavi, 2023; Ristani et al., 2016; Souza et al., 2020). Program Bantuan Keuangan Khusus (BKK), setiap programnya memiliki sifatnya masing-masing, sifat yang dimaksud adalah program yang bersifat wajib (program yang harus dijalankan) dan program yang bersifat pilihan (program yang boleh dijalankan ataupun tidak dijalankan, sesuai dengan kondisi desa).

Fokus program BKK masih pada pemahaman masyarakat yang buruk tentang Bantuan Keuangan Khusus, yang menyebabkan pengelolaannya belum berjalan sepenuhnya. Salah satu program yang tidak berjalan adalah Insentif guru tahfizh al-qur'an yang mana tidak ada masyarakat yang mendaftarkan anaknya ke tahfizh qur'an tersebut, pihak Pemerintahan Desa sudah memberikan informasi dengan menyampaikan ke Madrasah atau MDA dan mengunggah di sosial media seperti Facebook. Perlu di lakukan pengenalan tentang Bantuan Keuangan Khusus dengan membuat sosialisasi kepada masyarakat karena ketidaktahuannya masyarakat merasa tidak ada pentingnya atau kegunaan Bantuan Keuangan Khusus bagi mereka.

Adapun studi ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Rejosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu 2022-2023. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Evaluasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Rejosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu 2022-2023.

Berdasarkan pernyataan-pertanyaan diatas maka penting untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana desa dalam mengelola Bantuan Keuangan Khusus dan program-programnya. Dengan melakukan penelitian ini, pemerintah akan mendapat manfaat dari mempertimbangkan dan memperbaiki desa.

## METODE

Creswell (2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menyelidiki dan memahami dampak dari sejumlah orang atau sekelompok orang pada masalah sosial. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. (Priyanda et al., 2022).

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif (Busetto et al., 2020; Hollin et al., 2020; Kyngäs, 2020). Metode ini digunakan oleh penulis untuk menjawab fenomena penelitian Evaluasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Rejosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Oleh karena itu, dengan menggunakan pendekatan ini, penulis berusaha untuk memberikan gambaran mendalam tentang situasi, kondisi, dan pengalaman yang terjadi. Ini memungkinkan mereka untuk menjelaskan dengan jelas hasil penelitian. (Lumma & Weger, 2023). Selain itu, dalam peneliti menggunakan informan dan key informan untuk mendapatkan keterangan mengenai pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Rejosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.

**Tabel 2.** Informan dan Key informan

No.	Informan/ Key Informan	Jumlah
1.	Kepala Desa.	1
2.	BPD.	1
3.	Perangkat Desa.	2
4.	Masyarakat.	2
Jumlah		6

Sumber : data olahan penulis, 2024

Informan penting, menurut Moleong, adalah mereka yang tidak hanya dapat memberikan informasi tetapi juga dapat memberikan penulis sumber bukti yang mendukung penelitian mereka. (Naimah & Utaminingsih, 2021). Menurut Moleong (2017:132), informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informasi yang diterima harus jelas, akurat, dan dapat diandalkan baik dalam pernyataan, keterangan, maupun data-data agar peneliti dapat memahami masalah atau masalah tersebut. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, informasi yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis untuk membandingkannya dengan teori yang relevan. Kemudian, informasi tersebut diuraikan secara deskriptif dan kesimpulan dibuat. (Alam, 2021; Amadi, 2023).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Rejosari Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu 2022-2023 cukup efektif dan optimal, tetapi masih ada beberapa program yang tidak berjalan sesuai dengan rencana.

Dunn mendefinisikan evaluasi sebagai jenis kebijakan yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan arah yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya berdasarkan beberapa kriteria penilaian: efisiensi, efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketetapan. (Gębczyńska & Brajer-Marczak, 2020; Mohammed & Kuyini, 2021; Wibowo, 2019).

1. Efektivitas berkaitan dengan apakah suatu alternatif mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan. Penting untuk mempertimbangkan nilai uang saat mengevaluasi efektivitas..

Berdasarkan observasi bahwa indikator efektivitas disimpulkan bahwa sudah cukup efektif, karena masih ada program yang belum berjalan. Tetapi untuk program yang lainnya pemerintahan desa telah melaksanakan program yang ada didalam Bantuan Keuangan Khusus dengan sesuai tujuannya untuk dapat memajukan desa, yang mana di tiap program memiliki tujuan yang telah diatur dalam Bantuan Keuangan Khusus itu sendiri.

2. Efisiensi erat terkait dengan efektivitas dan jumlah usaha yang digunakan. Perhitungan sumber daya untuk mencapai efektivitas tertinggi biasanya digunakan untuk mengukur efektivitas.

Berdasarkan observasi bahwa sudah cukup efisien, pelaksanaan program yang belum berjalan secara keseluruhan, contohnya program tahfizh yang belum ada sama sekali murid yang mendaftar. Terkendala kurangnya informasi yang disebarkan. Karena sudah ada aturannya maka program yang lainnya dilaksanakan dengan baik. Kecukupan adalah tingkat yang menunjukkan efektivitas dari kebijakan yang diterapkan sehingga memberikan kepuasan atas kebutuhan masyarakat atau bahkan penyelesaian terhadap permasalahan. Kecukupan dalam hal ini melibatkan kebijakan yang terlaksana atas program dan aturan yang sudah ditentukan berdasarkan kinerja organisasi dalam terwujudnya tujuan yang ditetapkan. Kecukupan dalam hal ini bertolak pada kinerja seseorang dengan perbandingan akan target yang ditentukan.

3. Pemerataan adalah hasil dari kebijakan yang dapat dirasakan secara keseluruhan dan didistribusikan secara adil. Ini terkait dengan etika sosial dan regional dan menunjukkan bagaimana akibat dan upaya didistribusikan antara kelompok masyarakat.

Berdasarkan observasi indikator pemerataan, pelaksanaan program yang merata karena sesuai dengan aturannya.

4. Responsivitas adalah tingkat pengaruh kebijakan yang mampu menyelesaikan masalah dengan nilai dan preferensi masyarakat, mengetahui kebutuhan masyarakat, dan merencanakan dan melaksanakan program atau kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Kegiatan ini dapat dianggap sebagai respons terhadap tantangan yang dihadapi melalui tindakan yang dibuat.

Berdasarkan observasi bahwa, mendapat respon baik dari masyarakat karena masyarakat ikut merasakan dari kemajuan desa serta program yang berkaitan dengan masyarakat terutama bagi masyarakat yang mendapat Bantuan Keuangan Khusus.

5. Ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantive, yang merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program serta kekuatan dari asumsi yang melandasi tujuan kebijakan.

Berdasarkan observasi bahwa, memberikan penjelasan serta informasi tentang program program dari BKK untuk memanfaatkannya dengan benar serta layak sesuai dengan tujuannya.

6. Kecukupan adalah tingkat yang menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau bahkan menyelesaikan masalah. Kecukupan dalam hal ini mencakup kebijakan program dan aturan yang sudah ditetapkan berdasarkan bagaimana organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini, kecukupan didasarkan pada kinerja seseorang dibandingkan dengan target yang ditetapkan.



Berdasarkan observasi bahwa anggaran BKK terbilang cukup karena yang bersifat keuangan pasti selalu ada saja kurangnya, disebabkan juga Pendapatan Asli Desa yang tidak begitu menunjang. Dana akan semakin besar jika BUMDesa berjalan ataupun maju. Tetapi BKK akan digunakan sesuai dengan programnya yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan provinsi, apabila anggaran BKK terdapat sisa, sisa tersebut akan dikembalikan kepada pemerintahan provinsi.

## SIMPULAN DAN SARAN

Evaluasi pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Desa Rejosari Kecamatan Lirik Kabupaten IndragiriHulu menunjukkan bahwa pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus yang sudah cukup optimal dalam menjalankan program Bantuan Keuangan Khusus. Jumlah anggaran yang terbatas, karena ditiap program yang memiliki ketentuannya dalam pengeluaran dana. Tidak adanya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan rendahnya sumber dana manusia, dikarenakan minat orang tua dalam memberikan pendidikan terkhusus dalam agama, maka kendala dalam menjalankan program BKK yang belum cukup efektif.

Terbatasnya jumlah anggaran yang telah ditetapkan oleh pemerintahan provinsi, bisa meminta penambahan anggaran kepada pemerintah provinsi akan kekurangan dana anggaran Bantuan Keuangan Khusus serta memberi kendala-kendala yang terjadi. Melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengerti dari tujuan dan manfaat program Bantuan Keuangan Khusus.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Dr. Nina Yulsaini, S. IP, M. Si., serta semua dosen Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Islam Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Baso, A. A. (2023). *SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS 1 MILYAR 1 DESA PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR*. Universitas Hasanuddin.
- Adamowicz, M., & Zwolińska-Ligaj, M. (2020). The “Smart Village” as a way to achieve sustainable development in rural areas of Poland. *Sustainability*, 12(16), 6503.
- Alam, M. K. (2021). A systematic qualitative case study: questions, data collection, NVivo analysis and saturation. *Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal*, 16(1), 1–31.
- Amadi, A. (2023). Integration in a mixed-method case study of construction phenomena: From data to theory. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 30(1), 210–237.
- Badaruddin, B., Kariono, K., Ermansyah, E., & Sudarwati, L. (2021). Village community empowerment through village owned enterprise based on social capital in North Sumatera. *Asia Pacific Journal of Social Work and Development*, 31(3), 163–175.
- Busetto, L., Wick, W., & Gumbinger, C. (2020). How to use and assess qualitative research methods. *Neurological Research and Practice*, 2(1), 14.
- del Arco, I., Ramos-Pla, A., Zsembinszki, G., de Gracia, A., & Cabeza, L. F. (2021). Implementing sdgs to a sustainable rural village development from community empowerment: Linking energy, education, innovation, and research. *Sustainability*, 13(23), 12946.



- Dendorfer, P., Osep, A., Milan, A., Schindler, K., Cremers, D., Reid, I., Roth, S., & Leal-Taixé, L. (2021). Motchallenge: A benchmark for single-camera multiple target tracking. *International Journal of Computer Vision*, 129, 845–881.
- Gębczyńska, A., & Brajer-Marczak, R. (2020). Review of selected performance measurement models used in public administration. *Administrative Sciences*, 10(4), 99.
- Hollin, I. L., Craig, B. M., Coast, J., Beusterien, K., Vass, C., DiSantostefano, R., & Peay, H. (2020). Reporting formative qualitative research to support the development of quantitative preference study protocols and corresponding survey instruments: guidelines for authors and reviewers. *The Patient-Patient-Centered Outcomes Research*, 13, 121–136.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kyngäs, H. (2020). Qualitative research and content analysis. *The Application of Content Analysis in Nursing Science Research*, 3–11.
- Li, L., Zeng, Y., He, Y., Qin, Q., Wang, J., & Fu, C. (2022). Developing village-based green economy in an endogenous way: A case study from China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(13), 7580.
- Lindig, S., Moser, D., Curran, A. J., Rath, K., Khalilnejad, A., French, R. H., Herz, M., Müller, B., Makrides, G., & Georghiou, G. (2021). International collaboration framework for the calculation of performance loss rates: Data quality, benchmarks, and trends (towards a uniform methodology). *Progress in Photovoltaics: Research and Applications*, 29(6), 573–602.
- Liu, M., Feng, X., Wang, S., & Qiu, H. (2020). China's poverty alleviation over the last 40 years: Successes and challenges. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, 64(1), 209–228.
- Lumma, A.-L., & Weger, U. (2023). Looking from within: Comparing first-person approaches to studying experience. *Current Psychology*, 42(12), 10437–10453.
- Mohammed, A. K., & Kuyini, A. B. (2021). An evaluation of the free senior high school policy in Ghana. *Cambridge Journal of Education*, 51(2), 143–172.
- Naimah, S. N., & Utaminingsih, S. (2021). The Leadership of Schools to Improve Teacher Performance in Al-Amin Kids Park. *ANP Journal of Social Science and Humanities*, 2(2), 99–103.
- Naser, M. Z., & Alavi, A. H. (2023). Error metrics and performance fitness indicators for artificial intelligence and machine learning in engineering and sciences. *Architecture, Structures and Construction*, 3(4), 499–517.
- Osborne, S. (2020). *Public service logic: Creating value for public service users, citizens, and society through public service delivery*. Routledge.
- Priyanda, R., Agustina, T. S., Ariantini, N. S., Rusmayani, N. G. A. L., Aslindar, D. A., Ningsih, K. P., Wulandari, S., Putranto, P., Yuniati, I., & Untari, I. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Pradina Pustaka.



- Ristani, E., Solera, F., Zou, R., Cucchiara, R., & Tomasi, C. (2016). Performance measures and a data set for multi-target, multi-camera tracking. *European Conference on Computer Vision*, 17–35.
- Rondinelli, D. A. (2022). Administrative decentralization of agricultural and rural development programs in Asia: A comparative analysis. In *Agricultural extension worldwide* (pp. 22–57). Routledge.
- Silubun, A. J., Kalalo, J. J. J., Inggit, A. B., Kalalo, C. N., & Rahail, E. B. (2020). Village authority and position in realizing village autonomy. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 473(1), 12032.
- Souza, V. M. A., dos Reis, D. M., Maletzke, A. G., & Batista, G. E. (2020). Challenges in benchmarking stream learning algorithms with real-world data. *Data Mining and Knowledge Discovery*, 34(6), 1805–1858.
- Sunarso, H. S., & SH, M. H. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Tyas, B. H. S., Winarti, S. E., Raharjo, T. P., & Puspitasari, C. (2023). BELENGGU DESA MEWUJUDKAN PRIORITAS DAERAH. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(2), 155–169.
- Vogel, R. C. (2021). Savings mobilization: the forgotten half of rural finance. In *Undermining rural development with cheap credit* (pp. 248–265). Routledge.
- Wibowo, M. P. (2019). *Analisis Kelayakan Usaha Jamur Tiram Putih (Pleurotus Ostreatus) di Desa Lambang Sari Satu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu*.
- Zhang, X., & Zhang, Z. (2020). How do smart villages become a way to achieve sustainable development in rural areas? Smart village planning and practices in China. *Sustainability*, 12(24), 10510.
- Zhang, Y., Westlund, H., & Klaesson, J. (2020). Report from a Chinese Village 2019: Rural homestead transfer and rural vitalization. *Sustainability*, 12(20), 8635.